KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16, JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN:http//www.bkipm.kkp.go.id, POS ELEKTRONIK bkipm@bkipm.kkp.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 16/KEP-BKIPM/2017

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, perlu dilakukan reformasi birokrasi;

b. bahwa guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, perlu disusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

10. Keputusan . . .

10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan panduan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup BKIPM.

KETIGA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan 31 Desember 2017.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2017

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN,

ttd.

RINA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
Kerja Sama, dan Humas

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Sugiman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 16/KEP-BKIPM/2017
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUN 2017

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI BKIPM TAHUN 2017

1. PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN

No.	Rencana Aksi	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi												
2	Sosialisasi RB BKIPM												
3	Laporan Pelaksanaan RB BKIPM												
4	Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan												
5	Bulan Bakti Karantina dan Mutu												
6	Penyusunan Strategi Komunikasi BKIPM												
7	Penilaian Pelaksanaan RB di UPT BKIPM												

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI BKIPM TAHUN 2017

2. PROGRAM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Rencana Aksi	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Penyusunan Program Legislasi BKIPM												
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri/ Kepala BKIPM												
3	Evaluasi Peraturan Terkait BKIPM												

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI BKIPM TAHUN 2017

3. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN

No.	Rencana Aksi	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Penataan Organisasi Unit Pusat BKIPM												
2	Penataan Organisasi UPT BKIPM												
3	Pelaksanaan Analisis Beban Kerja												
4	Pelaksanaan Analisis Jabatan												
5	Survey Internal PMPRB												

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI BKIPM TAHUN 2017

4. PROGRAM PENGUATAN TATA LAKSANA

No.	Rencana Aksi	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Monitoring dan Evaluasi SOP												
2	Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik												

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI BKIPM TAHUN 2017

5. PROGRAM PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA

No.	Rencana Aksi	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pemerosesan Hukuman Disiplin Pegawai	■											
2	Evaluasi Kehadiran Pegawai												
	* Monitoring Kehadiran Pegawai Bulanan		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	* Evaluasi Kehadiran Pegawai Triwulan				■			■			■		■
3	Penyelesaian Kasus/Masalah Aktual dan Administrasi				■				■			■	
4	Sasaran Kerja Pegawai												
	* Monitoring Capaian Target SKP			■			■			■			■
5	Uji Kompetensi/Assesment Pejabat Struktural dan Pejabat Administrasi			■									
6	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Eselon II Pusat						■						
7	Kecerdasan Emosional dan Spiritual Pegawai				■								
8	Pemetaan Kompetensi Pegawai BKIPM										■		
9	Evaluasi Pasca Diklat PHPI											■	
10	Penyusunan Analisa Jabatan		■	■	■	■							
11	Penyusunan Analisis Beban Kerja		■	■	■	■							

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI BKIPM TAHUN 2017

6. PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

No.	Rencana Aksi	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Penerapan Sistem Pengelolaan Kinerja Berbasis BSC												
2	Penyusunan Perjanjian Kinerja Lingkup BKIPM Tahun 2017												
3	Penyusunan Rencana Kerja K/L Tahun 2017												
4	Review Renstra BKIPM 2015-2019												
5	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan SAKIP BKIPM												
6	Monitoring, Evaluasi, Peloporan Kinerja, dan Keuangan												
7	Penyusunan Laporan Kinerja (Triwulan dan Tahunan)												
8	Penyusunan Manual IKU												
9	Publikasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja												

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI BKIPM TAHUN 2017

7. PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN

No.	Rencana Aksi	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Laporan Sistem Pengendalian Intern Triwulan												
2	Monitoring Sistem Pengendalian Mutu												
3	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)												
4	Pembangunan Zona Integritas dan WBK/WBBM												

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI BKIPM TAHUN 2017

8. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

No.	Rencana Aksi	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Sosialisasi Standar Pelayanan Publik												
2	Inovasi Pelayanan Publik												
3	Implementasi Standar Pelayanan Publik												
4	Pekan Pelayanan Publik												
5	Evaluasi Layanan Pengaduan												
6	Replikasi *Role Model* Pelayanan Publik												

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI BKIPM TAHUN 2017

9. PROGRAM *QUICK WINS* REFORMASI BIROKRASI

No.	Rencana Aksi	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Percepatan Penerbitan Sertifikat HACCP												

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN,

ttd.

RINA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
Kerja Sama, dan Humas

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Sugiman